

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

03

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan <input checked="" type="checkbox"/>	

Tingkatkan Pengawasan Dana Desa

PALANGKA RAYA – Pada 2020 ini, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima dana desa sebesar Rp1,403 triliun lebih. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 1.433 desa yang tersebar di 13 kabupaten.

Dengan besarnya dana desa, maka pengawasannya juga harus lebih ditingkatkan lagi, agar dana tersebut benar-benar digunakan dengan maksimal untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tersebut.

Asisten I Setda Kalteng

Hamka, usai pembukaan Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Rakor P3MD), di Swissbel Hotel Danum, baru-baru ini mengatakan, anggaran dana desa cukup besar, karena semakin tahun semakin meningkat.

Namun seiring meningkatnya anggaran dana desa ini, maka pengawasannya juga harus lebih maksimal lagi, baik oleh pemerintah daerah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun dari aparat penegak hukum.

“Ini sangat diperlukan, agar tujuan dana desa yang digelontorkan ke desa itu betul-betul tercapai, yaitu untuk meningkatkan pembangunan di desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalteng ini lagi.

Lebih lanjut dia mengatakan, terdapat sejumlah kendala terkait dana desa ini antara lain, sering terlambatnya peraturan desa serta terlambatnya pelaporannya, sehingga ini berdampak pada pe-

ngucuran dana desa.

Hal tersebut terjadi antara lain karena terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, ujar Hamka, untuk itu, instansi terkait di daerah tersebut diharapkan dapat terjun langsung untuk membantu desa-desa yang mengalami kendala tersebut.

“Pemerintah kabupaten diharapkan segera terjun ke desa-desa yang mengalami terlambat tersebut. Harus dilakukan jemput bola, agar tidak ada terkendala untuk pencairan dana desa,” ujarnya. dkw